

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, 2006, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Edisi Kedua Ceatakan Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.

Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang.

Bambang Poernomo, 2004, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Bandung: Liberty.

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Cik Hasan Bisri, *Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kerangka Berpikir*, Bandung: Pusat Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati, 1999.

Didi Sunardi dan Endra Wijaya, 2011, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa*, Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila.



Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*, Yogyakarta: Liberty.

Haeranah, 2016, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*, Makassar: Pustaka Pena Press.

Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

M.D.A. Freeman, 1994, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, London: Sweet and Maxwell Ltd.

Mohammad Fajrul Falaakh, dkk., 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi* (Jilid II), Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.



Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat didalam Proses Acara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada.

Nia Kurniati, 2012, *Laporan Akhir, Tim Pengkajian Hukum tentang Pengelolaan Tanah Negara Bagi Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: BPHN.

R. Soenarto Soedibroto, 2003, *KUHP & KUHPA*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak-hak asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 5, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.

Triatmodjo, 1982, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada Dalam KUHPA*, Bandung: Alumni.



Wiryono Prodjodikoro, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung:
Citra Aditya.

Jurnal :

Anonim, 2011, *Disintegrasi Yugoslavia*, Yogyakarta: Jurnal Universitas Negeri
Yogyakarta.

Eka Puji Astuti Sitorus, *Kekuatan Hukum Saksi A De Charge dalam
Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri
Kisara*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Edisi 2016.

Suswantoro, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu
Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, *Jurnal
Hukum Magnum Opus*, Volume I, Nomor 1, Agustus 2018.

Online :

A. Samsan Nganro, *Praktik Penerapan KUHP dan Perlindungan HAM*,
Artikel di Publikasi di Hukum Online pada 16 Oktober 2016.

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri, lihat [https://humas.polri.go.id/tugas-
fungsi-dan-kewenangan-polri/](https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri/) diakses pada 9 Mei 2019

Siti Yuliandari Lalisu, *Proses Penahanan: Pelanggaran HAM*, Artikel yang
dipublikasi pada Kamis, 24 Januari 2013

Tindakan sewenang-wenang aparat negara, lihat <http://www.gendovara.com>

akses pada 27 Januari 2019.



Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)



Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
tentang Manajemen Penyidik Pegawai Negeri Sipil

